JITAA: Journal Of International Taxation Accounting and Auditing

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JITAA/index
DOI: https://doi.org/10.62668/jitaa.v3i01.1168
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN PROVINSI DI PULAU JAWA PADA TAHUN 2014-2023

Aksan Isnawan*[1], Uswatun Khasanah[2]
[1,2] Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
*Corresponding Author: Aksan18000102442webmail.uad.ac.id

Info Article
Received :
03 April 2024
Revised :
11 Mei 2024
Accepted :
01 Juni 2024
Publication :
29 Juni 2024

Keywords:
Regional Original Revenue, Unemployment, Poverty, Regional Investment.
Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran, Kemiskinan, Invetasi Daerah

Licensed Under a *Creative Commons Attribution 4.0 International License*

Abstract: *Regional Original Revenue (PAD) is one of the important parameters in evaluating the economic progress of a region. Increases or decreases in PAD can reflect the current economic conditions. This research aims to determine the influence of unemployment, poverty, regional investment, population size, and regional minimum wage (UMP) on provincial revenue in Java Island. The study was conducted in 6 provinces on Java Island, using secondary data obtained from BPS (Central Statistics Agency) and the Ministry of Finance, and tested using panel data regression. The software Eviews 12 was used for analysis. The results show that poverty, regional investment, population size, and UMP significantly affect regional original revenue, while the unemployment variable does not affect regional original revenue.*

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu parameter penting dalam mengevaluasi kemajuan ekonomi suatu daerah. Peningkatan atau penurunan PAD dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh pengangguran, kemiskinan, investasi daerah, jumlah penduduk dan UMP terhadap pendapatan asli provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan di 6 provinsi di Pulau Jawa, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Keuangan serta diuji menggunakan regresi data panel. Alat yang digunakan untuk melakukan uji penelitian ini adalah *software* Eviews 12. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kemiskinan, investasi daerah, jumlah penduduk serta UMP berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi keempat terbanyak di dunia. Populasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 257,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun populasi Indonesia bertambah sebanyak 3,9 juta jiwa. Jumlah populasi yang besar akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan, kelaparan, dan lain-lain. Kemiskinan adalah salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. (Wibowo & Khoirudin, 2019). Sektor sekunder memiliki peran terkecil dalam kesempatan kerja di Indonesia (Hakim dkk, 2017). Pajak menurut UU no 28 thn 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Nugraha & Khoirudin, 2021). Dalam perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia, faktor penting yang tidak boleh dilupakan adalah penyerapan tenaga kerja (Utama & Khoirudin, 2021).

Negara Indonesia membutuhkan dukungan langsung dan tidak langsung dari semua kelompok, serta dari pemerintah pusat dan daerah, untuk mencapai kemajuan di semua domain. Salah satu cara pemerintah pusat mempromosikan pembangunan yang adil di Indonesia adalah dengan mempercayakan pemerintah daerah dengan tanggung jawab melaksanakan pembangunan daerah, yang diberikan kepada mereka melalui otonomi daerah. Saat ini, pemerintah daerah (pemda) dituntut agar dapat mandiri. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, (Kumoro & Ariesanti, 2017). Tujuan utama memberi pemerintah daerah lebih banyak wewenang dan tanggung jawab dari adalah untuk mendukung pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan secara keseluruhan. Tujuan utama memberi pemerintah daerah lebih banyak wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat adalah untuk mendukung pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam mengelola dana yang berasal dari dalam perbatasan wilayah mereka. Selain memiliki kewenangan untuk mengendalikan banyak aspek urusan pemerintahan dan pertumbuhan, pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki keleluasaan untuk menemukan sumber pendanaan untuk upaya ini. (Khasanah & Khoirudin, 2020) Pembangunan terkait perumahan dan infrastruktur menjadi prioritas, mengingat rumah merupakan kebutuhan pokok di Indonesia selain kebutuhan sandang dan pangan. (Kurnianto & Khoirudin,

2021). Luas wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan secara nasional perkembangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada semua pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 meliputi pajak daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, dan juga PAD lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber belanja daerah, menurut (Siskha Sari et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber yang berada di wilayah tersebut, dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Konstitusi yang berlaku. (Fahriza dkk, 2022). Daerah perlu memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi keuangan lokal dan kapabilitas untuk mengelola serta memanfaatkan dana secara mandiri apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber daya keuangan utama. (Bagaskara, 2023) Sektor perumahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak yang diakui Pemerintah Daerah sebagai peningkat nilai kekayaan bersih dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua arus masuk uang ke kas umum daerah, meningkatkan ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak memerlukan pengembalian oleh daerah. Menurut (Kakasih, 2018).

Lalu menurut Keynes (Wongkar dkk, 2023), masalah pengangguran dianggap selalu ada dalam perekonomian hal ini bisa terjadi karena pengeluaran agregat lebih rendah dari pada kemampuan atau kesanggupan dari factor-faktor dalam produksi yang ada yaitu didalam suatu perekonomian untuk dapat memproduksi dari suatu barang maupun jasa.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat secara signifikan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah karena berdampak pada berbagai sumber pendapatan yang biasanya diperoleh oleh pemerintah daerah. Ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan membiayai program-program yang diperlukan untuk masyarakat.

Dalam (Hidayat & Hukom, 2023). Ditunjukan oleh Bank Dunia tolak ukur untuk mengukur garis kemiskinan yaitu dari gaji individu. Untuk mengukur garis kemiskinan yaitu berdasarkan pendapatan perorang seperti yang dilakukan yakni oleh Bank Dunia

yang dianggap miskin adalah individu yang mendapat upah pendapatan atau gaji adalah kurang yakni dari 1 US$ Kemudian BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yaitu dalam buku yang telah di publikasikan, mengukur dua model, yakni :

a. Kriteria untuk Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu adalah bagian keluarga yang tidak dapat menyelesaikan perintah agama dengan baik, makan di suatu tempat sekitar dua kali makan setiap hari, membeli lebih dari satu baju untuk setiap individu setiap tahun, memiliki lantai keramik lebih dari 80%, dan pergi ke Puskesmas jika sakit.
b. Kriteria Keluarga Sejahtera 1(KS 1), yakni keluarga yang tidak memiliki bekal dalam menjalankan perintah agama dengan sempurna. Seminggu sekali makan telur,ikanatau daging, bisa membeli satu baju pakaian setiap tahun, luas lantai rumah normal adalah 8 meter setiap minggu. Menurut kerabat, tidak ada kerabat yang berusia 10 hingga 60 tahun yang tidak terampil, satu orang dari keluarga tidak mempunyai gaji standar, lalu keseluruhan anak berusia 5 sampai 15 tahun, dan yang terakhir tidakada yang sakit selama 3 bulan.

Menurut (Ningsih & Sari, 2018), Secara konvensional dalam ekonomi, investasi merujuk pada pembelian barang modal atau produksi. Berikut adalah beberapa contoh investasi daerah dan alasan mengapa investasi semacam itu dapat menjadi strategi yang diperhitungkan:

a. Pengembangan Infrastruktur:
   Investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi umum di suatu daerah dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
b. Pembangunan Pabrik dan Industri:
   Membangun fasilitas manufaktur atau pabrik di suatu daerah dapat menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan penduduk, dan memberikan dampak positif pada ekonomi setempat.
c. Properti dan *Real Estate*:
   Investasi dalam pembangunan properti atau proyek real estat di suatu daerah dapat meningkatkan nilai properti, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
d. Pembangunan Energi:
   Investasi dalam proyek energi terbarukan atau infrastruktur energi di suatu daerah dapat mendukung sumber energi bersih dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.

e. Pendidikan dan Pelatihan:
   Investasi dalam fasilitas pendidikan dan pelatihan di suatu daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
f. Pariwisata:
   Pengembangan sektor pariwisata melalui investasi dalam infrastruktur pariwisata, akomodasi, dan atraksi lokal dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata setempat.

Investasi daerah sering kali menjadi strategi penting bagi pemerintah lokal, investor swasta, dan organisasi pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta sering dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Penduduk miskin merupakan kelompok rentan terhadap kerawanan pangan sehingga dibutuhkan investasi di daerah/penduduk miskin. (Sukarniati, 2013)

Teori jumlah penduduk merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami pertumbuhan, distribusi, dan karakteristik populasi manusia di suatu wilayah atau negara. Berikut adalah beberapa teori penting yang berkaitan dengan jumlah penduduk:

a. Teori Malthusian: Dipelopori oleh Thomas Malthus pada akhir abad ke-18, teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan melebihi pertumbuhan sumber daya yang tersedia, seperti makanan. Malthus memperingatkan bahwa jika tidak ada kontrol terhadap kelahiran, populasi akan terus berkembang sementara sumber daya yang tersedia akan tetap terbatas, yang pada akhirnya akan menghasilkan kelaparan, penyakit, dan kekacauan sosial.
b. Teori Demografi Transisi: Teori ini menggambarkan pola pertumbuhan penduduk dalam masyarakat yang mengalami perubahan ekonomi dan sosial. Teori ini menyatakan bahwa populasi suatu negara melalui empat tahap transisi demografi:
   - Tahap pertama: Tingkat kelahiran dan kematian tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk rendah.
   - Tahap kedua: Meskipun tingkat kematian tetap tinggi, tingkat kelahiran meningkat, sehingga pertumbuhan penduduk cepat.
   - Tahap ketiga: Tingkat kelahiran mulai menurun, sementara tingkat kematian tetap rendah, menyebabkan pertumbuhan penduduk melambat.

- Tahap keempat: Tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga pertumbuhan penduduk stabil.

c. Teori Epidemiologi Penduduk: Teori ini mengaitkan antara faktor kesehatan dan tingkat kematian dengan struktur populasi. Dalam teori ini, perubahan dalam pola penyakit dan kesehatan populasinya dipandang sebagai faktor penting dalam perubahan jumlah penduduk.
d. Teori Kependudukan Optimum: Teori ini mengajukan bahwa ada jumlah optimum penduduk yang dapat mencapai keseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan kebutuhan populasi. Jumlah penduduk yang tepat akan memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara.
e. Teori Fertility Transition: Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan atau fertilitas. Ini termasuk perubahan dalam pendidikan, akses terhadap kontrasepsi, perubahan dalam status sosial perempuan, dan perubahan dalam kebijakan keluarga.
f. Teori Distribusi Penduduk: Teori ini membahas pola distribusi geografis populasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti sumber daya alam, kondisi iklim, aksesibilitas, dan pengembangan infrastruktur.
g. Teori Migrasi Penduduk: Teori ini mempelajari pergerakan penduduk antar wilayah, negara, atau benua. Faktor-faktor seperti kesempatan ekonomi, perubahan politik, konflik, dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi pola migrasi populasi.

Teori upah minimum provinsi mencerminkan pemikiran bahwa penetapan tingkat upah minimum dapat disesuaikan atau ditentukan oleh otoritas pemerintah di tingkat provinsi atau regional, bukan oleh pemerintah pusat atau tingkat nasional. Teori ini menekankan perlunya mempertimbangkan perbedaan dalam biaya hidup, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap wilayah. Beberapa argumen dan pertimbangan terkait teori upah minimum provinsi melibatkan:

a. Perbedaan Biaya Hidup: Daerah atau provinsi dengan biaya hidup yang lebih tinggi cenderung memerlukan upah minimum yang lebih tinggi agar pekerja dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Penetapan upah minimum yang bersifat regional dapat mencerminkan perbedaan ini.
b. Tingkat Inflasi yang Berbeda: Tingkat inflasi dapat bervariasi di setiap wilayah. Upah minimum yang disesuaikan dengan tingkat inflasi setempat dapat membantu menjaga daya beli pekerja di masing-masing provinsi.

c. Kondisi Ekonomi Lokal: Kondisi ekonomi suatu daerah, termasuk tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan struktur industri, dapat berbeda antara provinsi-provinsi. Penyesuaian upah minimum dapat menjadi alat kebijakan untuk mengatasi perbedaan ini.
d. Ketidaksetaraan Regional: Penetapan upah minimum provinsi dapat dianggap sebagai langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antarwilayah di suatu negara.
e. Desentralisasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Teori ini mendukung desentralisasi kebijakan ketenagakerjaan, di mana pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyesuaikan tingkat upah minimum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi setempat.
f. Perlindungan Pekerja dan Kesejahteraan Sosial: Penetapan upah minimum provinsi dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di daerah dengan biaya hidup yang tinggi.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan ini juga dapat memunculkan tantangan, seperti potensi perpindahan usaha atau pekerja ke daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum provinsi harus diterapkan dengan hati-hati dan memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi dan ketenagakerjaan di seluruh negara.

Pusat kegiatan ekonomi Indonesia adalah Pulau Jawa, hal itu juga disebabkan oleh letak Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Jawa, sehingga pembangunan untuk menunjang kelayakan suatu ibukota Negara menjadi prioritas bagi Negara. Namun tentu saja pembangunan ini tidak hanya pada ibukota Negara saja, namun juga wilayah atau daerah di sekitarnya sebagai penunjang akses yang baik dan layak. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa PAD Pulau Jawa lebih besar dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, besarnya PAD provinsi di Pulau Jawa. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa PAD Pulau Jawa lebih besar dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, hal tersebut tak lepas dari jumlah penduduk yang sangat besar yang mempengaruhi roda perekonomian (Yuniarti, 2007). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui PAD yang mampu diraih masing-masing provinsi di Pulau Jawa dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap ketimpangan PAD antar provinsi di Pulau Jawa. Menentukan keadaan ekonomi setiap provinsi di Indonesia merupakan salah satu keunggulan studi PAD provinsi. Ekonomi provinsi yang kuat ditunjukkan oleh PAD yang lebih besar dan sebaliknya, penurunan PAD provinsi menunjukkan penurunan kualitas perekonomian provinsi. (Khoirudin & Nasir, 2021)

Sektor usaha kecil dan menengah saat ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasikan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selain itu penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kuantitatif, untuk melihat fenomena-fenomena serta hubungan yang terjadi menggunakan model matematis, teori, dan hipotesi yang berkenaan dengan fenoneman yang diteliti. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data dengan perangkat lunak aplikasi Eviews 12. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 6 Provinisi di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2014-2023.

Pendekatan analisis penelitian berupa data panel, penggunakan data panel lebih informatif, variative dan mengurangi korelasi. Selain itu data panel juga dapat mengukur dan mengetahui dampak atau pengaruh dari setiap varibel yang digunakan dalam penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menegtahui pengaruh dari setiap variabel independent yang memepengaruhi proses pembentukan pertumbuhan ekonomi regional. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Estimasi data penelitian melakukan uji asumsi klasik berupa normalitas data, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear. Pemilihan modal regresi data panel dalam melakukan estimasi pemilihan regresi digunakan untuk melihat estimasi model mana yang dapat menjelaskan data dengan baik, berupa pendekatan common effect, fixed effect dan random effect.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Min	Max
PendapatanAsli Daerah (y)	60	27.660.99	2.915.000	49.404.55
Pengangguran (x_1)	60	6.42	2.72	10.95
kemiskinan (x_2)	60	8.90	3.42	14.55
Investasi daerah (x_3)	60	30.593.65	294.00	89.223.00
Jumlah penduduk (x_4)	60	24.983.15	3.637.00	50.025.00
UMP (x_5)	60	1.954.324	910.000	4.900.798

Dalam tabel 1 akan memberikan penjelasan deskriptif untuk beberapa variabel penelitian. Selain itu, variabel pendapatan asli daerah, kemiskinan, pengangguran, investasi daerah, ukuran populasi, dan UMP akan digunakan dalam penelitian ini. Nilai Min dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai nilai terkecil dalam rangkaian pengamatan, kebalikannya, Maks menunjukkan himpunan nilai tertinggi pengamatan. Mean, atau nilai rata-rata, adalah nilai berikutnya dan diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah total titik data. Selain itu, berikut ini adalah temuan analisis deskriptif dari lima variabel menggunakan ukuran 60 sampel.

Pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat pendapatan asli daerah terendah (2.915 miliar) pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat akan memiliki tingkat pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2023 (49.404,55 miliar), sementara enam provinsi di Pulau Jawa akan memiliki pendapatan asli daerah rata-rata 27660,99 miliar antara tahun 2014 dan 2023.

Variabel pengangguran menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terendah pada tahun 2016 sebesar 2,72%, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 sebesar 10,95%. Dari 2014 hingga 2023, enam provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat pengangguran rata-rata 6.425%.

Variabel Kemiskinan mengungkapkan bahwa Provinsi Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 14,55 persen, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat terendah pada tahun 2019, yaitu sebesar 3,42 persen. Dari 2014 hingga 2023, persentase rata-rata kemiskinan di enam provinsi Jawa adalah 8,9%. Variabel penting yang mempengaruhi sebuah keluarga menjadi miskin adalah tingkat pendidikan karena variabel ini dianggap sebagai modal manusia. (Suripto dkk, 2020).

Variabel investasi menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2017 memiliki tingkat investasi terendah sebesar 294 miliar Rupiah, sedangkan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 memiliki tingkat investasi terbesar sebesar 89,223 miliar Rupiah. Antara 2014 dan 2023, enam provinsi di Pulau Jawa menerima investasi rata-rata 30.593 miliar.

Berdasarkan pengujian statistik variabel Jumlah Penduduk, Provinsi Jawa Barat memiliki Jumlah penduduk tertinggi (2023) sebesar 50.025 ribu, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta memiliki tingkat populasi terendah (3.637 ribu) pada tahun 2014. Antara 2014 dan 2023, rata-rata populasi enam provinsi di Pulau Jawa adalah 24.983 ribu.

Variabel UMP menunjukkan bahwa tingkat UMP terendah, 910.000 ribu Rupiah pada tahun 2014, berada di Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat UMP terbesar, 4.900.798 juta Rupiah, berada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Sejak 2014 hingga 2023, rata-rata UMP di enam provinsi di Pulau Jawa adalah 1.954 juta rupiah.

Uji Model Terbaik

Tabel 2. Uji Data Panel

Variabel	**CEM**	**FEM**	**REM**
C	16506.41	-42328.90	16506.41
X1	-2194.941	-1149.471	-2194.941
X2	-1752.838	-288.9980	-1752.838
X3	0.013373	0.052012	0.013373
X4	0.869601	2.945829	0.869601
X5	0.009617	0.003203	0.009617

Dari ketiga model Dalam tabel 4.2. Akan dilaksanakan uji guna memilih model manakah yang terbaik dari ketiga tersebut. Model terbaik guna dipergunakan selanjutnya akan ditentukan melalui uji Chow, serta uji Hausman.

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	35.849713	(5,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	88.065711	5	0.0000

Berdasar hasil dari uji chow Dalam tabel 4.3, didapatkan nilai pada probabilitas angka sebesar 0,0000 serta angka tersebut lebih kecil dibanding dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, setelah itu hal ini menunjukkan bahwasanya H_0 ditolak serta menerima H_a yang artinya adalah *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik dibanding dengan *Common Effect Model (CEM)*.

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	179.248566	5	0.0000

Berdasarkan hasil dari uji Hausman pada tabel 4.4 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga bisa ditarik

kesimpulan bahwasanya *Fixed Effect Model* adalah model yang paling tepat guna penelitian ini dikarenakan H0 ditolak serta Ha diterima.

Tabel 5 Fixed Effect Model

Variabel	Coef.	Std.Err.	t	P > |t|
Pengangguran	-1149.4	285.08	-4.03	0.0002
Kemiskinan	-288.99	403.37	-0.71	0.4777
Investasi	0.0520	0.0220	2.36	0.0229
Jumlah Penduduk	2.9458	0.4564	6.45	0.000
UMP	0.0032	0.0007	4.20	0.0001
Cons	-42328.9	12832.4	-3.29	0.0020

Koefisien dari variabel pengangguran yaitu adalah sebesar -1149,4 yang artinya adalah jika terjadi kenaikan pengangguran sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat PAD sebesar 1149,4 Miliar. Koefisien dari variabel Kemiskinan yaitu adalah sebesar -288.99 yang artinya adalah jika terjadi kenaikan Kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat PAD sebesar 288.99 Miliar. Koefisien variabel investasi yaitu sebesar 0,0520 yang artinya adalah peningkatan tingkat investasi sebesar 1 miliar maka akan meningkatkan tingkat PAD sebesar 0.0520 miliar. Koefisien dari variabel jumlah penduduk yaitu sebesar 2.9458 yang berarti bahwa jika tingkat jumlah penduduk naik sebesar 1 ribu maka akan meningkatkan tingkat PAD sebesar 2.9458 Miiar. Koefisien dri variabel UMP yaitu sebesar 0.0032 yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan tingkat UMP sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan tingkat PAD sejumlah 0.0032 miliar.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Uji F

F-Statistik	F-Tabel
419.416	2,38607

Dari hasil uji f-simultan Dalam tabel 4.8, dapat menjelaskan bahwasanya nilai F-statistik sebesar 419.416 serta nilai F-Tabel yakni sebesar 2,38607, artinya f-statistik > f-tabel. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya variabel independen secara Bersama-sama memberi pengaruh variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 7. Uji Uji Koefisien Determinasi

R-Squared	**0.990085**

Pada uji tabel 4.5, 0.990085 yang bisa diartikan bahwasanya dalam penelitian ini tingkat Pendapatan Asli Daerah pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023 dijelaskan oleh Pengangguran, kemiskinan, Investasi Daerah, Jumlah Penduduk, *serta UMP*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien determinasi yang direpresentasikan dengan nilai adjusted R-squared. Sisanya 0,01% dijelaskan oleh variabel lain.

KESIMPULAN

Bisa ditarik kesimpulan dari penelitian di atas yang mempunyai tujuan yakni meneliti pengaruh variabel pengangguran, kemiskinan,investasi daerah, jumlah penduduk serta UMP terhadap pendapatan asli daerah di 6 provinsi Pulau Jawa antara tahun 2014 hingga 2023, didasarkan dari penelitian yang dilaksanakan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya:

a. Penelitian yang mencakup 6 provinsi Pulau Jawa antara tahun 2014 hingga 2023 yakni menghasilkan bahwasanya tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi daerah, jumlah penduduk serta UMP memberi dampak secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Pulau Jawa periode 2014-2023.
b. Model terbaik yang dipilih dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect*.
c. Variabel Investasi daerah, jumlah penduduk, serta UMP memberi dampak positif serta signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Pulau Jawa periode 2014-2023.
d. Variabel kemiskinan memberi dampak negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Pulau Jawa periode 2014-2023.
e. Variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Pulau Jawa periode 2014-2023.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, *1*(01), 37-44.

Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012-2016. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 458-466).

Asmara, P. S., & Abdullah, R. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI IMB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU. *Entries*, *2*(1), 32-44.

Bagaskara. (2023). MODELLING THE DRIVERS OF HOUSING PRICE USING AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG – ERROR CORRECTION MODEL (ARDL-ECM) IN INDONESIA. J*ournal of Asset Management and Public Economy*, *2*(1), 53-64. https://doi.org/10.12928/jampe.v2i1.6696

Dja'wa, A., Rudi, R. A., & Puspitaningsih, A. (2021). PELATIHAN PEMBUATAN NUGGET IKAN, GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN PESISIR KELURAHAN PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA. *Indonesian Journal of Community Service*, *1*(2), 297-301.

Fahriza, Y. N., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2022). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN NUSA TENGGARA TIMUR (2015-2020). *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, *17*(2), 108-118. https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2022.17.2.2970

Hakim, A.R., Adhisti, M., Khoirudin, R., & Sukarniati, K. (2017). SEKTOR TERSIER DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA (ANALISA INPUT OUTPUT). *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya II*, 50-57. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hidayat, A., & Hukom, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM, DAN PENGANGGURAN DI KALIMANTAN TENGAH PADA TAHUN 2010-2019. *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, *1*(2), 11-20. https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.166

Kakasih, .R.A. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANAALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADAKABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SULAWESI UTARAPERIODE 20019-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(2), 124–134.

Khasanah, U., & Khoirudin, R. (2020). MULTIPLIER GROSS INCOME ANALYSIS AS A PROPERTY ASSET VALUE DETERMINATION IN THE CITY OF YOGYAKARTA. *International Journal of Economic and Business Applied* *1*(1), 45-57.

Khoirudin, R., & Nasir, M.S. (2021). PENGEMBANGAN USAHA DAN STRATEGI

BISNIS UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, *3*(1), 107-111.

Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNGAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *2*(1), 75–90. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3684

Kurnianto, M.D., & Khoirudin, R. (2021). FEASIBILITY STUDY ANALYSIS OF TPI KUWARU PONCOSARI SRANDAKAN BANTUL. *International Journal of Economic and Business Applied 2*(2), 91-103.

Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BATAM. *Jurnal Akuntansi Barelang*, *3*(1), 21–31.

Nugraha, S.A., & Khoirudin, R. (2021). FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PBB DI YOGYAKARTA. J*urnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, *2*(3), 371-382.

Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, *1*(01), 37–44. https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124

Utama, A.Y., & Khoirudin, R. (2021). ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *18*(2), 147-155. https://doi.org/10.31849/jieb.v18i2.6027

Sukarniati, L. (2013). DETERMINAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KOMODITI BERAS TAHUN 1980-2010). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 69–80. https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/163/115

Suripto, Firmansyah, & Sugiyanto, F. X. (2020). POVERTY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF DOMESTIC PRODUCTION IN YOGYAKARTA: THE SOLOW GROWTH MODEL APPROACH. *International Journal of Business and Globalisation*, *24*(2), 174–184. https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.105166

Wibowo, A. R., & Khoirudin, R. (2019). ANALYSIS OF DETERMINANTS OF POOR

POPULATION IN CENTRAL JAVA 2008-2017. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *14*(1), 1-15. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1482

Wongkar, A. N. Rotinsulu, T. O., & Maramis, M. T. B. (2023). PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(3), 49–60.

Yuniarti, D. (2007). ANALISIS DETERMINAN PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA PENDEKATAN GRAVITY MODEL. *Economic Journal of Emerging Markets*, *12*(2). https://doi.org/10.20885/vol12iss2aa509